

Tema 2 : Seksualitas, Penghukuman dan Penjeraan

Topik : Wacana keagamaan terkait seksualitas dan politik tubuh: teologi kepatuhan dan kepemilikan tubuh perempuan

**VIKTIMISASI SEPOTONG KAIN
(STUDI KASUS MAHASISWI BERCADAR DI IAIN KENDARI)**

Asliah Zainal; Muh. Ikhsan; Danial

Institut Agama Islam Negeri Kendari

Korespondensi; Asliah Zainal

liazain03274@gmail.com

Abstrak

Masyarakat Indonesia saat ini mudah terjebak dalam simbolisasi agama yang dengan mudah diartikan secara artifisial. Studi ini akan mencermati kasus mahasiswi bercadar di IAIN Kendari yang difokuskan pada dua hal, pertama penyebab munculnya fenomena mahasiswi berjilbab di IAIN Kendari, dan kedua dampak sosial akademis terhadap situasi kampus akademik keagamaan secara khusus dan implikasi sosial pada pemaknaan atas hak-hak perempuan secara umum. Fenomena mahasiswi bercadar di IAIN Kendari mulai muncul sejak tahun 2014 dan makin menguat pada tahun 2017 dengan terdaftarnya 7 mahasiswi bercadar. Hadirnya mahasiswi bercadar disikapi beragam oleh masyarakat kampus, mulai dari pembiaran juga pembelaan, kesalahan pemberian nilai oleh dosen, bahkan pemanggilan khusus oleh pimpinan. Sikap “penolakan” kampus disikapi mahasiswi yang berasumsi secara tergesa bahwa perolehan nilai yang rendah dan ketidakkulusan adalah efek dari “sepotong kain” cadar yang dikenakannya. Penelitian ini menemukan bahwa hadirnya mahasiswi bercadar di IAIN Kendari disebabkan oleh terbukanya akses bagi paham dan organisasi fundamental dan radikal masuk dan menyusup dalam organisasi intra kampus. Selain itu, “restu” diberikan oleh kampus dalam bentuk pembiaran bagi dosen yang menjadi eksponen gerakan radikal HTI, pemberian dana DIPA atas nama organisasi intra (Lembaga Dakwah Kampus, Koperasi Mahasiswa dan Gema Pembebasan) dan pemberian izin bagi gerakan-gerakan *underbow* yang menyusup dalam organisasi intra mahasiswa. Sikap kampus yang membiarkan bahkan memberikan “restu” menyumbang cukup signifikan hadirnya fenomena mahasiswi bercadar, sebab menganggap kampus mengizinkan paham dan organisasi fundamental dan radikal bertumbuh di kampus. Gerakan massif organisasi yang bersikap radikal ini tidak berimbang dengan paham dan gerakan kemahasiswaan yang lebih moderat di kampus ini. Hadirnya fenomena mahasiswi bercadar secara massif ini secara naif disikapi kampus dalam bentuk kepanikan akademik dan kontrol atas keyakinan agama yang justru dapat melahirkan bentuk radikalisme baru. Studi ini menggarisbawahi bahwa perlakuan-perlakuan “khusus” terhadap mahasiswi bercadar di IAIN Kendari adalah bentuk kontrol dan politisasi kepatuhan atas tubuh perempuan sekaligus juga viktimisasi korban secara tergesa-gesa. Fenomena mahasiswi bercadar sebagaimana halnya di IAIN Kendari membuktikan sekali lagi bahwa perempuan, baik ia mengenakan pakaian secara minim maupun berpakaian menutupi aurat tubuhnya, tetap saja menjadi kontrol sistem sosial, kultural maupun agama. Dengan demikian, kasus ini menegaskan bahwa tubuh perempuan bukan milik dirinya sendiri, tetapi milik sistem sosial, kultural, dan agama yang dipolitisasi.

Kata Kunci: viktimisasi korban, politisasi tubuh perempuan, cadar, radikalisme agama.

A. Pengantar

Tulisan ini akan dimulai dari kisah seorang mahasiswi bercadar semester V di Program Studi Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari bernama UH. Dia mulai mengenakan cadar sejak masuk di IAIN Kendari. Pada saat ujian mengaji yang dilaksanakan oleh fakultas setiap semester, dia dinyatakan tidak lulus dan tidak dapat diberikan sertifikat lulus tes mengaji. Karena itu, ia harus mengulang ujian sampai dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat tersebut. Sertifikat lulus mengaji menjadi salah satu prasyarat mengikuti ujian komprehensif bagi para mahasiswa yang akan menyelesaikan studi. Oleh tim penguji, lembar penilaian tes diberi tulisan “cadar”. Catatan kecil tersebut ditanggapi oleh mahasiswi bersangkutan secara emosional dan tergesa-gesa. Sang mahasiswi menfoto catatan kecil tersebut dan mengunggahnya di Facebook miliknya. Catatan kecil tersebut dikomentari sang mahasiswi dengan kalimat-kalimat yang menandakan kekecewaan dengan sedikit “curiga” bahwa tulisan “cadar” pada catatan kecil lembar penilaian adalah bentuk perlakuan yang tidak adil terhadapnya. Ia menganggap bahwa ketidakkulusannya dalam tes mengaji adalah akibat cadar yang dikenakannya. Oleh salah seorang dosen, *curhat* mahasiswi di Facebook diunggah di WhatsApp grup dosen IAIN dan sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan dosen. Tidak hanya diskusi virtual lewat WA, diskusi dilanjutkan secara faktual hingga sampai pada tindakan yang seharusnya dilakukan kampus dalam menyikapi para mahasiswi bercadar. Respon yang diberikan para dosen cukup beragam; ada yang membela, tak acuh, bahkan juga geram. Fakultas dilaporkan tentang keberadaan *curhatan* mahasiswi di media sosial tersebut. Pimpinan fakultas segera memanggil sang mahasiswi untuk dilakukan klarifikasi dan dimintai keterangan. Pemanggilan tersebut membuahkan permohonan maaf sang mahasiswi yang menyadari kekeliruannya telah tergesa-gesa menuding fakultas melakukan diskriminasi hanya karena ia mengenakan cadar. Ia juga meminta maaf karena mengunggah kekecewaan akan pemberian nilai tersebut di media sosial. Permintaan maaf tidak cukup dilontarkan secara langsung, tetapi diposting pula di Facebook miliknya dan unggahan terdahulu tentang keluhannya atas kesalahan pemberian nilai dihapus di kronologinya. Cerita diatas menginspirasi tulisan ini. Postingan UH seperti “mengguncangkan” ketenangan kampus. Respon serta reaksi yang dilontarkan para civitas akademika kampus menghentak kesadaran bahwa ada sesuatu yang “salah tanggap” atau malah “gagal paham” dalam menyoal mahasiswi yang memakai cadar.

Pemakaian jilbab atau cadar bukanlah fenomena baru. Indonesia adalah negara yang para perempuan muslimah mengenakan cadar, bersamaan dengan peristiwa radikalisme dan terorisme yang melanda negeri ini. Eropa dan Afrika termasuk negara yang melarang penggunaan cadar dengan alasan bukanlah budaya lokal dan menghindari ancaman teroris yang menggunakan cadar sebagai selubung modus. Perancis adalah negara Eropa pertama sejak April 2004 yang melarang penggunaan cadar di tempat umum, pengawasan ketat atas simbol-simbol keagamaan di sekolah, bahkan mengenakan denda bagi para pemakainya. Sebagaimana Perancis, Belanda, Austria dan Denmark serta Mesir juga telah menerapkan regulasi yang melarang penggunaan cadar di tempat umum, kampus dan lembaga pemerintah dengan dalih agar memudahkan komunikasi (disarikan dari berbagai

berita online Republika, 2017 dan Tempo, 2015). Di Indonesia, beberapa perguruan tinggi negeri agama melarang mahasiswa dan dosen menggunakan cadar, sebagaimana halnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berbeda dengan perguruan tinggi agama, sekolah umum seperti halnya di salah satu SMK swasta di Tasikmalaya malah memberikan kesempatan kepada siswinya untuk memakai cadar pada upacara bendera 17 Agustus 2017 silam.

Cadar adalah fenomena yang hampir selalu diidentikan dengan radikalisme dan terorisme. Hal ini tidak terlepas dari peristiwa terorisme di Indonesia khususnya yang selalu melibatkan perempuan-perempuan, baik ia sebagai pendamping maupun sebagai “pengantin” bom. Para perempuan pendamping dan pengantin tersebut dicirikan oleh identitas cadar atau minimal jilbab besar. Perempuan atau istri-istri para teroris seperti halnya Ika Puspitasari, Munfiatun al Fitri (istri Noordin M Top), Delima/Umi Fadel (istri Santoso), Nurmi Usman/Umi Mujahid (istri Basri), dan Tini Susanti Kaduku/ Umi Delima (istri Ali Kalora), Dian Yulia Novi adalah perempuan-perempuan yang berada dibalik layar bagi gerakan terorisme yang melibatkan suami mereka, bahkan mereka juga menjadi perempuan kombatan, misalnya Dian Yulia Novi dan Ika Puspitasari. Cerita tentang keterlibatan perempuan Indonesia yang pernah atau tengah bersentuhan dengan kelompok fundamentalisme dapat ditemukan dalam buku “Kesaksian Para Pengabd: Kajian tentang Perempuan Fundamentalisme di Indonesia” yang ditulis oleh Marcoes-Natsir&Oktavia (2014).

Beberapa penelitian tentang pemaknaan atas perempuan dalam berbagai peran dan aktivitasnya menegaskan bahwa meskipun perempuan adalah pemilik tubuh, akan tetapi kuasa atas tubuhnya bukanlah dirinya sendiri melainkan tetaplah dipolitisasi oleh kekuasaan. Sebagaimana temuan Rohmana&Ernawati, 2014; Abdullah, 2002; Benedicta, Rachmah, 2004; Surur, 2004; Setyobudi&Alkaf, 2011. Studi-studi tersebut berfokus pada persepsi sosial terhadap peran yang dimainkan perempuan pada ranah sosial maupun budaya. Akan tetapi temuan ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya, dimana subyek perempuan justru bukan pada perannya yang aktif dalam ranah publik terbuka, tetapi justru pada upayanya untuk terlindung dan merasa aman secara sosial pada ranah publik. Selain itu, distingsi studi ini adalah pada keterlibatan interpretasi agama yang justru juga menempatkan perempuan dalam kontrol atas sistem kekuasaan.

Respon dan reaksi kampus atas kejadian yang fakta mahasiswi bercadar di IAIN Kendari adalah hal yang menarik lainnya. Berlatar konteks tersebut, maka tulisan ini akan mengkaji fenomena keberadaan mahasiswi bercadar di IAIN Kendari yang akan dilihat pada dua hal, yaitu pertama situasi sosial religius penyebab hadirnya para mahasiswi berjilbab di IAIN Kendari, dan kedua dampak sosial terhadap situasi akademik secara khusus dan implikasi sosial pada pemaknaan atas hak-hak perempuan secara umum. Untuk memudahkan penyebutan lokus riset, maka IAIN Kendari akan disebut dengan kampus. Dua fokus tulisan ini didasarkan pada pertanyaan mengapa mahasiswi bercadar mendapat perlakuan “berbeda” dan “khusus” sehingga mesti dipanggil dan ditanyakan dasar dan motivasi memakai cadar serta kesediaan mereka mencopot cadar jika diperlukan. Apakah perlakuan berbeda tersebut disebabkan oleh karena sepotong kain (sebagaimana asumsi awal sang mahasiswi).

Lalu jika demikian, apa yang salah dari sepotong kain? Apakah sepotong kain yang menutup wajah juga mesti disikapi dengan menutup selubung rasionalitas berpikir sekelas perguruan tinggi agama, seperti IAIN?

B. Setting Sosial Keagamaan Kampus

Religiusitas masyarakat Indonesia mulai muncul sejak era 2000-an dengan lahirnya berbagai komunitas religius dan institusi keagamaan yang melanda hampir semua kategori sosial dengan varian ajaran yang berbeda. Varian-varian paham yang melanda hampir semua kategori sosial tersebut muncul dalam bentuk majelis zikir, komunitas agama, paham atau aliran, hingga institusi keagamaan dengan metode dan media dakwah yang modern dan bervariasi pula. Demikian halnya untuk konteks Sulawesi Tenggara, dimana paham dan gerakan agama mulai bermunculan secara masif pada tahun 2000-an. Paham-paham keagamaan yang muncul banyak yang bercorak salafi dan cenderung fundamentalis, seperti halnya Wahdah Islamiyah, Jama'ah Tabligh, bahkan HTI. Organisasi keagamaan yang bercorak modern lebih dahulu hadir di Sulawesi Tenggara, seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Munculnya aliran-aliran keagamaan tersebut menandakan bangkitnya religiusitas masyarakat yang lebih mengarah ke corak salafi dan fundamental. Religiusitas masyarakat yang tumbuh dalam masyarakat modern perkotaan mendapatkan wadah dan lokus yang tepat dengan hadirnya lembaga-lembaga keagamaan bercorak demikian. Atau juga bisa sebaliknya, bahwa keberadaan lembaga-lembaga keagamaan bercorak salafi-fundamental tersebut untuk menampung dahaga masyarakat modern perkotaan yang haus akan spiritualisme dan keagamaan (Zainal, 2016).

Tulisan ini akan dilatari oleh setting sosial keagamaan kampus yang difokuskan pada dua hal, yaitu pertama, diversitas paham dan gerakan keagamaan civitas akademika; dan kedua, kegiatan akademik dan non akademik kampus.

B.1 Diversitas Paham dan Gerakan Keagamaan Civitas Akademika

Kondisi sosial keagamaan masyarakat Indonesia secara umum dan setting sosial religius masyarakat Sulawesi Tenggara secara khusus ikut mempengaruhi secara signifikan tumbuh dan berkembangnya paham dan gerakan keagamaan di kampus. Diversitas aliran keagamaan yang muncul tersebut dapat dilihat dari bergabungnya para civitas akademika dalam aliran-aliran keagamaan tersebut. Secara umum, civitas akademika kampus bergabung dalam berbagai aliran keagamaan seperti Mu'adz bin Jabal, Wahdah Islamiyah, Minhajul Tullab yang lebih bercorak teologi salafi-fundamental dan juga banyak yang tergabung dalam organisasi keagamaan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah yang dianggap lebih bercorak moderat. Aliran-aliran dan organisasi keagamaan tersebut menciptakan diversitas paham yang beraneka ragam di dalam kampus.

Dalam kondisi demikian, kampus seharusnya menjadi lokus praktek pluralitas yang meniscayakan toleransi dan kerukunan. Paham yang dibiarkan tumbuh secara beragam secara teori akan membiarkan perbedaan dan praktek keagamaan secara alamiah dan tumbuh secara wajar. Namun di sisi lain, diversitas paham yang beragam tersebut juga membuka peluang bagi masuknya paham salafi, wahabi, bahkan radikal. Fenomena ini juga ditemukan dalam kampus, dimana beberapa dosen dan mahasiswa bergabung dalam paham dan gerakan

transnasional radikal secara aktif, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tidak hanya terjadi dalam kampus IAIN Kendari, gerakan radikalisme juga merambah kampus umum seperti halnya Universitas Haluoleo dimana beberapa lembaga kemahasiswaan baik ditingkat universitas maupun fakultas telah tersusupi ajaran dan gerakan HTI (Lihat hasil penelitian Zainal, 2015; FKPT Sulawesi Tenggara, 2015)

Keberadaan para dosen yang berafiliasi dengan HTI ikut mempengaruhi pula pemahaman mahasiswa di kampus dengan banyaknya mahasiswa yang bergabung dengan HTI dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan HTI. Paham dan gerakan HTI di Sulawesi Tenggara sangat massif dan aktif melakukan berbagai aktifitas dan mampu menyedot perhatian massa. Beberapa kegiatan HTI yang dipusatkan di lapangan MTQ atau hotel-hotel dalam bentuk Konferensi Islam dan Peradaban serta Majelis Panji Rasulullah hampir selalu dipadati massa dari berbagai kalangan. Di IAIN Kendari, lembaga internal kampus seperti Koperasi Mahasiswa (Kopma), Lembaga Dakwah Kampus (LDK), dan Gema Pembebasan sudah terpapar paham HTI dan para pengurusnya hampir semua menjadi eksponen aktif serta militan di HTI. Kegiatan-kegiatan LDK yang mengatasnamakan lembaga kemahasiswaan setiap tahunnya dibiayai oleh anggaran kampus, akan tetapi aktivitas-aktivitas yang dilakukan selalu mengarah kepada kaderisasi paham dan kegiatan-kegiatan kajian yang pro-ideologi HTI. Naifnya, para dosen dan mahasiswa yang terpapar HTI tersebut secara lantang menyuarakan perlawanan terhadap sistem Pancasila dan menyebut pemerintahan sekarang adalah pemerintahan kafir dan thoghut. Akan tetapi, juga makan dan hidup dari biaya yang dianggarkan oleh negara melalui kampus. Mereka menggugat pemerintahan sebagai pemerintahan thoghut, tetapi fasilitas, biaya kuliah dalam bentuk beasiswa, dan kegiatan-kegiatan internal kampus disuapi oleh dana negara yang mereka kafirkan.

Tidak hanya kegiatan LDK yang sangat marak dibiayai oleh kampus, para eksponen HTI juga aktif melakukan kaderisasi pada para mahasiswa. Setiap saat, setiap kesempatan, kader-kader HTI di kampus secara rutin dan intensif giat dan tak kenal lelah mengajak para mahasiswa untuk mengikuti kajian dalam kelompok-kelompok mereka. Tidak peduli berapa orang, dua atau bahkan satu orang menjadi target mereka terutama pada mahasiswa baru yang masih polos dan terbatas pemahaman agamanya. Para mahasiswa eksponen HTI tersebut sangat rajin menjelaskan dan meyakinkan mahasiswa yang dapat diajaknya di serambi-serambi masjid, di ruang-ruang kelas setelah atau sebelum kuliah, di bawah pohon atau di tempat-tempat lain yang memungkinkan untuk diskusi. Setelah sholat subuh akan didapati di setiap sudut serambi masjid kelompok-kelompok kecil; dua, hingga beberapa orang yang orang-orangnya dikenal sebagai mahasiswa eksponen HTI. Begitu pula hanya waktu-waktu lain ketika selesai sholat fardhu. Para mahasiswa yang sudah terpapar paham dan gerakan HTI di kampus bahkan dengan terang-terangan mengklaim diri dalam sebuah organisasi yang mereka sebut HTI chapter IAIN Kendari.

B.2 Kegiatan Akademik dan Non-akademik Kampus

Fakta sosial keagamaan sebagaimana disebutkan di atas adalah fenomena yang tidak berdiri sendiri. Fakta tersebut secara nyata dapat ditarik garis lurus pada konteks gerakan kemahasiswaan secara umum di kampus-kampus yang seperti lesu, kurang darah, dan mengalami impotensia. Berbagai macam peristiwa yang mencitrakan

negatif kader-kader pilihan alumni organisasi kemahasiswaan pada masanya seperti mengikis habis kepercayaan masyarakat terhadap kader-kader terbaik alumni organisasi-organisasi kemahasiswaan. Pada masanya, kader-kader terbaik merupakan figur yang sangat diandalkan masyarakat sebagai lokus aktivitas kritis para mahasiswa. Sayangnya, ketika para aktivis purna menjadi mahasiswa dan menempati kursi yang empuk dalam kekuasaan, banyak dari mereka yang tak mampu meleps diri dalam rayuan sistem yang korup. Pada akhirnya, gaung gerakan organisasi kemahasiswaan hanya menjadi alat politik bagi kekuasaan atau tunggngan preferensi bagi kepentingan praktis sang kader. Ironis, sebab mereka malah menodai semangat kritis dan pergerakan yang dahulu ketika menjadi mahasiswa mereka suarakan dengan lantang. Gerakan kemahasiswaan yang moderat di kampus-kampus telah mengalami *distrust* oleh sebab kasus korupsi, moralitas, dan kasus lain yang membalik sejarah kedigdayaan organisasi kemahasiswaan ke titik nol. Pada saat bersamaan secara perlahan, bertunaslah gerakan-gerakan keagamaan di kampus-kampus yang berlandaskan paham-paham salafi, wahabi, bahkan radikal. Gerakan-gerakan keagamaan baru tersebut melahirkan para kader-kader militan yang secara konsisten memperjuangkan Islam yang dianggap sebagai Islam yang sebenarnya (*Islam kaffah*). Masyarakat kampus bahkan masyarakat umum jadi memiliki alternatif baru bagi paham dan spritualitas keagamaan yang tumbuh dalam masyarakat modern. Religiusitas masyarakat urban perkotaan menemukan muaranya justru dalam paham dan gerakan salafi, wahabi bahkan radikal (Zainal, 2016).

Militansi yang dibangun oleh jaringan HTI di kampus IAIN Kendari, keaktifan dan intensitas dalam organisasi, dan kaderisasi yang solid sayangnya tidak diimbangi dengan polaritas paham dan organisasi mahasiswa lainnya, seperti PMII, HMI, atau IMM. Bahkan boleh dikatakan organisasi kemahasiswaan yang disebut belakangan lumpuh dan lesu dalam agenda-agenda diskusi dan kegiatan sosial keagamaan. Belakangan baru pada tahun-tahun 2016 muncul organisasi kemahasiswaan seperti PMII, HMI dan IMM, meskipun belum bisa dikatakan dapat mengimbangi gaung dan aktifnya diskusi serta gerakan massif organisasi HTI di kampus. Selain itu, para civitas akademika, baik itu dosen maupun karyawan di kampus yang tergabung dalam paham dan organisasi salafi dan wahabi ikut menumbuhsururkan rahim paham dan gerakan fundamental-radikal di kampus.

Fenemona yang ironis ini menegaskan bahwa aktifitas Islam moderat di kampus tenggelam bahkan hampir pupus dibalik militansi dan intensitas gerakan HTI yang naifnya tidak lagi secara diam-diam digelorakan, tetapi secara nyata dan lantang diartikulasikan dalam banyak kegiatan LDK yang berbau HTI. Ini adalah ironi paradoksal antara militansi gerakan HTI, soliditas paham salafi/wahabi, dan stagnasi gerakan Islam moderat (PMII, HMI, dan IMM). Konteks dan situasi sosial tersebut menyumbang cukup signifikan terhadap fakta aktivitas keagamaan di kampus IAIN Kendari.

Gerakan-gerakan militansi yang diusung para eksponen HTI sudah pula menysar pada bangku-bangku kuliah dan ruang-ruang kelas. Setiap materi mata kuliah yang sedikit saja bersentuhan dengan negara, ideologi atau fakta sosial yang timpang, selalu saja sengaja “digiring” oleh mahasiswa terpapar ajaran HTI pada ideologi

khilafah. Bagi mereka, khilafah adalah solusi satu-satunya sistem pemerintahan Islam, dan juga menjadi satu-satunya alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan bangsa dari kehancuran.

Secara terbuka dan terang-terangan para mahasiswa terpapar mendeklarasikan diri dihadapan publik dukungan terhadap HTI, penolakan terhadap PKI dan penolakan terhadap Perppu no. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 17 tahun 2013 yang mengatur Organisasi Kemasyarakatan. Para mahasiswa terpapar ini juga membuat akun di media sosial dengan menggunakan simbol-simbol kampus, seperti mencatut nama kampus atau menggunakan atribut kampus dalam setiap kegiatan kaderisasi atau deklarasi mereka. Seolah-olah mereka ingin menegaskan pada publik bahwa kegiatan dan gerakan mereka telah direstui oleh kampus secara legal.

Fenomena ini tetap dibiarkan oleh kampus tanpa ada reaksi atau tindakan apapun dari pimpinan, beragam riset, laporan, keluhan oleh para civitas akademika telah disampaikan pada pimpinan tentang aktivitas organisasi intra kampus tersebut. Hingga ketika muncul video tentang dekalasi mahasiswa yang secara verbal menyatakan dukungan terhadap HTI yang menyebabkan polisi masuk kampus baru kampus bereaksi. Para pimpinan hingga ketua prodi diundang rapat dan diajak diskusi tentang sikap dan tindakan apa yang harus dilakukan kampus. Rapat tersebut rasanya adalah tindakan yang terlambat dan kepanikan yang emosional. Ketika kampus selama ini tidak menunjukkan reaksi apapun terkait dengan gerakan mahasiswa demikian, maka mahasiswa semakin berani menyuarakan suara perlawanan karena mereka menganggap bahwa kampus “merestui” tindakan mereka. Kampus baru berani membuka suara ketika reaksi justru datang dari pihak luar, yaitu kepolisian yang justru “gerah” dengan video yang dungguh para mahasiswa tersebut. Kampus menjadi heboh dan merasa harus menggelar diskusi sebagai dasar pengambilan keputusan agar “aman” dari hujatan otoriter dan sewenang-wenang. Kesimpulan hasil rapat memutuskan bahwa perlu ada reposisi dua lembaga kemahasiswaan (LDK dan Kopma) dan memberikan sanksi kepada mahasiswa yang terlibat aktif dalam video pendukung HTI dengan skroking selama 1 semester. Diskusi tersebut melahirkan reaksi yang lebih keras lagi dari para mahasiswa. Mereka menggugat dan mengklaim rektor dan kampus sebagai agen yang tunduk pada rezim penindas, sewenang-wenang, dan melakukan upaya pembungkaman suara mahasiswa. Suara-suara perlawanan tersebut terus digaungkan baik lewat media sosial maupun poster-poster yang ditempel di kampus. Pada saat tulisan ini dibuat SK pemberian sanksi telah ditandatangani oleh Dekan salah satu fakultas yang empat orang mahasiswanya terbukti adalah eksponen HTI yang cukup militan.

Setting sosial keagamaan kampus sebagaimana dikemukakan di atas menyumbang cukup signifikan bagi paham-paham keagamaan yang “dibiarkan” bertumbuh subur di kampus. Gerakan-gerakan HTI yang secara terang-terangan menggugat pemerintah bahkan berani dengan lantang menuding sebagai pemerintahan kafir dan thoghut tetap dibiarkan melakukan aktivitas bahkan dibiayai pula. Maka, tidak heran jika aliran dan paham salafi dan wahabi juga bertunas subur di kampus ini. Bebarap dosen dan karyawan yang tergabung secara aktif dalam organisasi-organisasi keagamaan yang bercorak salafi/wahabi, seperti Mu’adz bin Jabal, Wahdah Islamiyah,

Minhajul Tullab cukup membuktikan asumsi tersebut. Dengan demikian, maka kampus dapat saja menampilkan wajah paham yang beragam, bahkan menjadi lokus yang menyuburkan paham-paham salafi dan wahabi, termasuk munculnya para mahasiswa bercadar di kampus keagamaan ini.

C. Respon dan Reaksi Kampus

Masyarakat Indonesia saat ini mudah terjebak dalam simbolisasi agama yang dengan mudah diartikan secara artifisial, termasuk dalam pemaknaan atas simboli pakaian. Sebagai bagian dari wujud kebudayaan, maka pakaian adalah sesuatu yang secara simbolis bisa dimaknai dengan banyak interpretasi, salah satunya merujuk pada identitas (King, 1982; Hall, 1992; Eriksen, 1993; Kipp, 1993; Kahn, 1995, Picard, 1997; Wood, 1998). Kekhawatiran terhadap pemakaian cadar ini tidak terlepas dari trauma terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa yang masuk dalam ajaran dan gerakan HTI di kampus, baik ia sebagai aktivis maupun partisan. Selain itu, kekhawatiran tersebut berhubungan dengan ketakutan akan terjadinya fenomena Arabisasi Islam di Indonesia, dimana Islam dianggap sebagai sesuatu yang identik dengan Arab. Penelitian saya tahun 2016 tentang kehadiran institusi pendidikan yang bercorak salafi/wahabi di Kota Kendari menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan agama yang bercorak fundamental dengan kekuatan dakwah yang massif menarik minat banyak masyarakat kota untuk menjadi jama'ah loyal. Kehadiran lembaga pendidikan Islam tersebut laksana oase ditengah padang pasir bagi masyarakat urban perkotaan. Akibatnya adalah terjadi polaritas ajaran dan gaya hidup masyarakat urban hingga pada penggunaan pakaian cadar atau minimal menggunakan jilbab panjang. Pakaian adalah sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan dan pakaian muslimah tidak bisa serta merta diidentikan dengan kebudayaan Arab atau menyerupai cara berpakaian muslimah Arab. Islam bukanlah Arab, meski secara genealogis agama ini lahir di jazirah Arab Saudi. Salah kaprah terhadap Islam adalah Arab terjadi dalam respon bagi para pemakai cadar, berupa ketakutan bahwa masyarakat muslimah Indonesia akan makin banyak yang mengenakan cadar sebagaimana perempuan muslim Arab menggunakannya.

Jika menyadari setting sosial keagamaan dengan diversitas paham dan gerakan agama sebagaimana diatas, seharusnya tidak mengherankan jika muncul para mahasiswa bercadar di IAIN Kendari. Hadirnya mahasiswa bercadar di kampus seharusnya tidak perlu disikapi dengan heran atau kaget oleh para civitas akademika kampus. Keberadaan mereka adalah sesuatu yang wajar oleh sebab kampus secara tidak langsung mempersilahkan paham apapun hadir dan bertunas di lembaga pendidikan tinggi keagamaan ini. Namun nampak ada “keterkejutan” kampus ketika pada tahun 2017, terdapat tujuh orang mahasiswa bercadar terdaftar sebagai mahasiswa baru di berbagai fakultas. Hadirnya mahasiswa bercadar ini bukan sesuatu yang baru, sejak tahun 2014 hingga tahun-tahun selanjutnya, telah ada mahasiswa bercadar sebagai mahasiswa di kampus sebanyak lima orang. Selain itu, ada pula satu orang dosen tetap non PNS. Namun barangkali karena kehadirannya tidak secara mencolok, maka reaksi yang ditimbulkan tidak terlalu frontal pula. Baru pada tahun 2017 ketika secara massif masuknya tujuh orang mahasiswa bercadar secara serentak mengguncang ketenangan kampus.

Kehadiran mahasiswi bercadar disikapi secara beragam oleh civitas akademika, terutama para dosen. Ada yang membiarkan dan menganggap tidak ada masalah dengan hadirnya mereka, ada pula yang membela, ada pula yang melarang secara negositatif dan persuasif, bahkan ada yang melarang secara frontal. Beberapa dosen di IAIN Kendari menyatakan tidak ada masalah dengan mahasiswi yang memakai cadar. Mereka merasa tidak terganggu dengan keberadaan para mahasiswi bercadar. Ada pula dosen yang justru membela jika para mahasiswi tersebut mendapatkan perlakuan diskriminatif atau pemaksaan untuk membuka cadarnya. Bagi dosen yang membela, cadar adalah bagian dari style atau model berpakaian. Dosen lain mengatakan bahwa silahkan memakai cadar di kampus, asal jangan menganggap bahwa dengan cadar mereka merasa berhak membeli dan memiliki surga dan yang lain tidak pantas dan berhak. Beberapa dosen yang tidak mempermasalahkan pemakain cadar oleh beberapa mahasiswi tidak pernah meminta mahasiswinya untuk membuka cadarnya. Bahkan ada dosen yang mengatakan bahwa cadar tidak menghalangi prestasi seorang mahasiswi, terbukti ada mahasiswi yang aktif, pintar dan bahkan mewakili kampus dalam ajang kompetisi. Oleh sebab itu, mahasiswi yang memakai cadar tidak perlu disikapi berlebihan, apalagi subjektif dalam memberikan nilai karena cadarnya.

Selain sikap yang pro terhadap para mahasiswi bercadar, ada pula beberapa dosen yang meminta mahasiswi untuk melepas cadar ketika di kelas. Program studi bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, para dosen yang mengajar di prodi tersebut, terutama dosen-dosen Bahasa Arab meminta sejak awal pertemuan kepada mahasiswi untuk membuka cadar. Permintaan tidak tertulis ini dilakukan dengan alasan bahwa mata kuliah bahasa Arab membutuhkan ketepatan artikulasi dan makhraj huruf yang benar dalam mengajar. Maka mahasiswi harus dapat mengucapkan lafadz dalam bahasa Arab secara benar sebelum ia dapat mengajar kepada para siswa siswinya. Selain itu, alasan para dosen yang meminta mahasiswi untuk mencopot cadar ketika di kelas adalah untuk mengenali identitas sang mahasiswi dan mencegah agar tidak keliru dalam memberikan nilai akibat tidak mengenali sang mahasiswi. Namun cara meminta mahasiswi untuk membuka cadar ada yang dilakukan secara instruktif dan ada pula yang dilakukan secara persuasif. Sepanjang wawancara dengan subyek penelitian, belum ada mahasiswi yang tidak mengikuti aturan tidak tertulis tersebut, sehingga ketika dosen tersebut mengajar maka ia akan membuka cadarnya, barulah setelah selesai kelas memakai kembali cadarnya.

Kehadiran para mahasiswi bercadar agaknya menimbulkan kekhawatiran, baik secara institusional ditingkat rektorat, fakultas dan prodi maupun secara personal bagi kalangan civitas akademika kampus, terutama bagi para dosen. Secara institusional ditingkat rektorat, kehadiran mahasiswi bercadar disikapi dengan cara memanggil semua mahasiswi bercadar ketika masa orientasi PBA (Pengenalan Budaya Akademik) bagi mahasiswi baru. Para mahasiswi dipanggil disalah satu ruangan pimpinan yang juga ikut dihadiri para dosen-dosen muda dibidang Tafsir dan Hadist. Mereka ditanya dasar pemahaman dan motivasi dalam memakai cadar, hingga pada pertanyaan apakah mereka bersedia menanggalkan cadar jika ada dosen atau aturan kampus mensyaratkan demikian. Para mahasiswi tersebut diberikan pula pemahaman tentang tafsir perintah menutup aurat dalam Al Qur'an dan Hadist. Kehadiran para dosen muda dibidang tafsir dan hadist adalah untuk

kepentingan menjelaskan hal tersebut. Para mahasiswi yang diwawancarai rata-rata mengatakan bahwa mereka sesungguhnya lebih memilih untuk tetap menggunakan cadar di dalam kampus, di dalam kelas atau ketika melakukan kegiatan akademik lainnya. Tetapi jika kampus menetapkan aturan harus membuka cadar, maka mereka mengatakan tidak ada masalah. Satu mahasiswi baru yang ditanya mengatakan bahwa ia berharap aturan tersebut tidak akan pernah ada, sebab ia sudah sangat nyaman dengan cara berpakaian yang dikenakannya dan meyakini bahwa itulah yang terbaik bagi dirinya sebagai perempuan.

Pada tingkat institusional fakultas, pemakaian cadar oleh mahasiswi disikapi dengan menerapkan aturan tidak tertulis agar para mahasiswi ketika sedang kuliah menanggalkan cadarnya. Begitu pula halnya dengan cara fakultas merespon dosen perempuan yang memakai cadar dipanggil khusus dan diminta untuk mencopot cadarnya dalam kegiatan-kegiatan akademik di kampus. Sang dosen beralasan bahwa dia memakai cadar oleh sebab alergi debu, cuaca, dan juga rokok. Alasan ini sesungguhnya adalah alasan pelarian dari keberatan sang dosen tersebut ketika diminta untuk membuka cadarnya. Namun oleh sebab permintaan Dekan, maka jadilah ia kadangkala mengenakan cadar selama di kampus dan kadang kala pula mencopotnya. Pada tingkat prodi, pemakaian cadar oleh banyak mahasiswi disikapi secara persuasif dengan meminta mereka untuk membuka cadar di ruang-ruang kuliah terutama yang berhubungan dengan mata kuliah bahasa Arab.

Fenomena pemakaian cadar oleh banyak mahasiswi yang terus bertambah menurut pimpinan fakultas mesti ada introspeksi manajemen pengelolaan kampus. Berkaca dari kehadiran dan keberanian para mahasiswa eksponen HTI yang secara terang-terangan menunjukkan perlawanan bagi pimpinan fakultas justru disebabkan oleh keteledoran kampus yang luput melakukan kontrol atas masuknya paham-paham radikal di kampus. Banyak dosen yang menganggap bahwa mahasiswa begitu mudah masuk dalam paham dan ajaran HTI oleh sebab ada dosen yang mengajarkan demikian. Begitu pula halnya jika di fakultas banyak mahasiswi bercadar karena telah ada model dan contoh dari dosen yang juga mengenakan cadar lebih dulu. Pimpinan fakultas juga menganggap bahwa kampus sudah harus mulai menetapkan regulasi internal dan instrumen untuk mengkategorisasikan dosen dan mahasiswa pada kategori ekstrim atau tidak, sebab jika tidak maka kampus lagi-lagi akan kecolongan sebagaimana dalam kasus mahasiswa HTI. Bagi pimpinan fakultas, pemakain cadar bagi banyak dosen di kampus akan makin marak pada masa-masa yang akan datang, sebab memakai cadar adalah soal ajaran yang akan mudah ditularkan, bukan idiologi yang memerlukan kaderisasi dan komitmen yang militan. Wawancara dengan para mahasiswi bercadar mengaku bahwa mereka masuk ke IAIN Kendari oleh karena pilihan sendiri. IAIN bagi mereka adalah kampus yang dapat menjadi wadah belajar agama lebih baik, termasuk harapan bahwa mereka dapat diizinkan untuk mengenakan cadar.

Disisi lain, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan PMII dan HMI sudah mulai terlihat geliatnya, meskipun belum seaktif dan seintens yang dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam HTI. Selain itu, masjid kampus juga sudah mulai marak dengan kajian-kajian keislaman, majelis-majelis tafsir Al Qur'an yang dinisiasi serta diisi oleh para dosen muda. Kegiatan kemahasiswaan yang

dipelopori oleh mahasiswa PMII dan HMI dan juga kajian keislaman yang diinisiasi oleh para dosen muda diharapkan dapat menjadi *counter balance* terhadap paham dan gerakan radikalisme yang dimotori oleh para dosen dan mahasiswa HTI. Radikalisme yang diusung para dosen dan mahasiswa HTI diimbangi dengan paham dan gerakan deradikalisasi oleh paham keislaman lainnya yang memang meniscayakan perbedaan dalam tafsir agama. Jika kegiatan-kegiatan akademik keagamaan dikampus tersedia secara variatif dan aktif, maka mahasiswa jadi memiliki banyak lokus pengetahuan, wadah mengkritisi sesuatu secara lebih fair, dan ajang aktualisasi diri sekaligus penemuan identitas diri yang lebih beragam. Konteks demikian diharapkan dapat melahirkan pemahaman-pemahaman agama yang tidak lagi tunggal dan konservatif.

D. Menyikapi Sepotong Kain; antara Kepanikan dan Penghakiman

Kecenderungan mahasiswa untuk bergabung dengan paham dan gerakan radikal karena usia-usia mereka adalah usia pencarian identitas dan jati diri, mereka juga sedang berada pada tahap pencarian idealisme yang membutuhkan ruang-ruang bagi aktualisasi diri. Pada kondisi demikian, hadir paham yang secara intens dan aktif memasukan ajaran-ajaran yang berlandaskan kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah sebagai jalan Islam. Paham dan ajaran demikianlah yang hadir memenuhi rasa ingin tahu, wadah yang bisa dimasuki, dan ruang yang dapat memenuhi media aktualisasi dan pencarian identitas diri para mahasiswa. Dengan kata lain, tidak ada alternatif lain bagi para mahasiswa menyalurkan kehausan akan ilmu dan kegiatan akademik keislaman selain yang didapatnya diruang-ruang kuliah, kecuali ajaran dan paham salafi, wahabi atau bahkan radikal.

Ketika mahasiswi memutuskan untuk mengenakan cadar, maka ada latar belakang keyakinan kuat yang mendorongnya berani memutuskan untuk menggunakan sesuatu yang tidak lazim, baik bagi masyarakat muslim Indonesia secara umum maupun masyarakat kampus secara khusus. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa beberapa civitas akademika kampus tergabung dalam paham dan organisasi salafi, wahabi, dan radikal. Ada relasi yang cukup signifikan antara keputusan mengenakan cadar dengan pengaruh ajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Dosen yang mengenakan cadar, sebab sebelumnya ia aktif sebagai ustadzah di lembaga pendidikan Mu'adz bin Jabal kota Kendari yang bercorak teologi salafi. Namun demikian, tidak berarti bahwa mahasiswi yang mengenakan cadar dikategorikan sebagai mahasiswi beraliran ekstrim atau mengusung ideologi radikalisme. Para mahasiswi bercadar tersebut tidak bergabung dalam HTI, rata-rata mereka mengikuti kajian dalam organisasi-organisasi salafi yang mengusung level ajaran bukan ranah ideologis. Hanya saja, ketika mahasiswi bercadar yang memposting kekecewaannya di Facebook, mendapatkan dukungan emosional dari para pendukung HTI, yang secara tergesa juga menganggap bahwa kekeliruan pemberian nilai hanya karena cadar adalah bentuk pengebirian hak perempuan muslim.

Motivasi para mahasiswi mengenakan cadar sangat beragam, akan tetapi mereka yang bertahan lama menggunakan cadar mengaku merasa nyaman dengan kondisi berpakaian sekarang dibandingkan dengan sebelum mengenakan cadar. Rata-rata para mahasiswi tersebut mengaku menggunakan cadar oleh sebab mereka merasa nyaman karena terlindungi dari godaan, terjaga kehormatannya, dan nyaman ketika harus muncul di depan publik.

Ada yang mengaku pemalu, dengan mengenakan cadar merasa lebih nyaman dalam mengemukakan pendapat dan tampil depan publik. Ada yang mengaku mengenakan cadar untuk menghindari gangguan dari para laki-laki dan merasa nyaman dan aman sebab tidak lagi diganggu setelah mengenakan cadar. Ada pula yang mengenakan cadar oleh sebab mencontoh istri Rasulullah yang terjaga diri dan kehormatannya. Para mahasiswi tersebut mengetahui bahwa ada tafsir yang berbeda dalam memaknai menutup aurat bagi perempuan, tetapi mereka memilih hal yang sunnah (dengan menutup wajah mereka), sesuatu yang dirasakan lebih nyaman dan aman. Sebaliknya, para dosen yang berpendapat cadar adalah sesuatu yang ekstrim menganggap bahwa pemakain cadar oleh para mahasiswi disebabkan oleh alasan emosional dalam beragama dan belum matang memahami perintah tentang menutup aurat.

Pemakaian cadar sesungguhnya lebih dari sekedar dalih sederhana sebuah model atau style. Mengenakan pakaian adalah menyoal kenyamanan dan kecocokan dengan pribadi pemakainnya. Namun dalam soal cadar, seorang muslimah yang mengenakanya jauh melampaui alasan tersebut. Cadar adalah sesuatu yang berhubungan erat dengan keyakinan agama, sesuatu yang sangat sensitif, sesuatu yang tidak dapat dicampuri dan diganggu gugat. Ketika sang dosen berdalih bahwa ia mengenakan cadar oleh sebab alergi debu, cuaca, atau rokok, sesungguhnya ia menyembunyikan alasan substantif yang berhubungan dengan pemahamannya tentang menutup aurat. Ia hendak melakukan negosiasi dengan menurunkan alasannya pada level yang sama yang dipikirkan oleh fakultas. Jadilah alasan-alasan yang dikemukakannya adalah alasan praktis, bukan alasan substantif. Para mahasiswi bercadar yang diminta untuk mencopot cadar ketika kuliah mencoba melakukan negosiasi pula dengan memenuhi keinginan fakultas, tetapi tetap pada keyakinan mereka bahwa lebih nyaman mengenakannya dalam kesempatan apapun. Jika memang para mahasiswi tersebut “rela” melepas cadarnya, maka mereka tentu akan menanggalkannya dalam semua kesempatan, tidak hanya pada ruang-ruang kuliah sebagaimana yang diminta oleh dosen. Cadar adalah bagian dari keyakinan mahasiswi, bagian dari kenyamanan mereka, bagian dari diri mereka. Tidak ada satupun atau seorangpun yang dapat mengontrolnya. Sama juga ketika seorang mahasiswi yang tadinya bercadar lalu mencopot cadarnya setelah dua hari pemakaian. Ia melepas cadarnya oleh sebab justru tidak merasa nyaman, sebab ia dijauhi oleh teman-temannya dan tidak mendapatkan izin dari orang tua. Namun, ia tetap berteman baik dan dapat diterima pula oleh teman-temannya yang tetap berkomitmen menggunakan cadar.

Cadar sebagai selubung yang menutup wajah bukan penghalang gerak dan aktivitas bagi para mahasiswi yang mengenakannya. Terdapat beberapa mahasiswi bercadar yang kerap mewakili kampus dalam ajang pionir (Pekan Ilmiah Olah Raga, Seni, dan Riset) atau tampil dalam acara-acara kesenian yang dipentaskan di kampus atau luar kampus. Sehari-hari ia mengenakan cadar, akan tetapi ketika tampil di depan umum, ia akan membuka cadarnya. Mahasiswi tersebut aktif mengajar anak-anak mengaji dan membuka cadar ketika mengajar mengaji, sebab ia sadar harus dapat mengajarkan tajwid dan makhraj huruf bahasa Arab dengan benar dan tepat. Para mahasiswi tersebut aktif mengikuti kuliah dan petunjuk dari dosen, ia juga tetap memiliki cita-cita untuk meneruskan kuliah hingga jenjang lebih tinggi. Seorang mahasiswi bercadar bahkan bercerita bahwa ia masih dapat bermain basket dengan tetap mengenakan cadar. Cadar baginya lebih dari sekedar kepercayaan agama

untuk membuatnya merasa terhormat dan agar tidak diganggu. Cadar adalah juga pelindung sekaligus juga “protes” bahwa ia ingin dianggap dan dihargai sebagaimana halnya manusia yang punya otak dan berprestasi, bukan dilihat dari kecantikan wajah atau kemolekan tubuh. Ia ingin mengkritisi pandangan yang menempatkan perempuan dalam penilaian-penilaian yang negatif atau yang memandang nilai seorang perempuan dari wajah dan penampilan. Ketika menggunakan cadar, orang jadi bisa lebih menilai dari hasil pikiran dia, bukan lagi dari penampilan fisiknya. Ia juga hendak menegaskan bahwa perempuan yang memakai cadar juga bisa melek informasi dan teknologi, mereka bisa bergaul dan membaur, mereka juga aktif di media sosial. Terlebih lagi ia ingin meluruskan pandangan umum bahwa orang menggunakan cadar itu eksklusif, polos dan lugu saja, hanya tahu hal secara terbatas saja. Jadi, tidak ada bedanya orang yang menggunakan cadar atau tidak.

Para mahasiswi bercadar tidak membatasi diri secara eksklusif dan ekstrim dengan hanya bergaul dengan sesama pemakai cadar. Mereka cukup terbuka dalam berkawan, meski masih tetap menjaga jarak dengan lawan jenis. Akan tetapi hal yang menarik adalah meskipun menggunakan cadar, ada beberapa mahasiswi yang tetap berjabat tangan dengan para dosen laki-laki dengan mencium tangan. Mereka juga terlihat cukup moderat dan “gaul”, mereka kerap melakukan update status dan mengunggah foto-foto mengenakan cadar dalam berbagai pose dan kesempatan. Hal ini menjadi sesuatu yang jika dilihat dan dinilai dari sisi berpakaian yang serba tertutup terasa paradoksal dan kontradiktif, disatu sisi tertutup dalam berpakaian akan tetapi pada wilayah yang lain sangat open dan kerap membuka diri di media sosial. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa pandangan yang menganggap bahwa cadar dapat menghalangi gerak dan aktivitas, cadar adalah sesuatu yang berorientasi ekstrim dan eksklusif tidak cukup terbukti. Tentu saja seorang muslimah yang mengenakan cadar akan membatasi pergaulannya dengan lawan jenis, tetapi bukan membatasi komunikasi pada ranah akademik, misalnya dalam mendiskusikan tugas-tugas kuliah.

Memakai cadar atau tidak, seorang perempuan tetap haruslah menjaga kehormatan dan martabatnya. Cadar adalah sehelai kain yang dipilih untuk menutupi wajah yang bagi para mahasiswi yang mengenakannya lebih dapat memberikan rasa aman, nyaman dan agar dapat menjaga kehormatan diri. Pakaian adalah pilihan seseorang, apatah lagi memakai cadar jauh melampaui pilihan berdasarkan model dan style, ia sudah menyentuh wilayah sensitif-privat, yaitu keyakinan agama seseorang. Persolannya bukan pada pakaian apa yang dikenakan oleh perempuan, tetapi justru yang mengganggu adalah pandangan dan persepsi orang terhadap perempuan yang mengenakan pakaian dimaksud. Pengakuan dari para mahasiswi bercadar bahwa setelah memakai cadarpun godaan dan gangguan terhadap mereka tetap ada, meski dalam wujud kalimat yang berbeda. Ketika perempuan mengenakan pakaian minim, ia dituding sebagai penyebab pornografi dan mengundang godaan syahwat kaum laki-laki. Syahwat laki-laki dalam hal ini ditempatkan secara terhormat dan sakral. Karena ia sakral, maka salah jika syahwat tersebut digoda untuk dibangkitkan, maka yang salah dan berdosa adalah perempuan yang berpakaian minim. Sang syahwat tetap ditempatkan dalam posisi agung tak bersalah. Bukankah ini justru

menegaskan kerentanan laki-laki yang begitu mudah goyah hanya karena keimanan biologis yang dimilikinya?, bukankah ini secara ironis sama juga dengan mengimani syahwat laki-laki?.

Perempuan yang mengenakan cadar hendak melindungi kehormatannya agar dapat dibedakan dengan perempuan kebanyakan yang bisa digoda karena berpakaian minim. Jika untuk alasan ini ia disalahkan, apakah itu cukup adil, apalagi diklaim sebagai penganut ajaran ekstrim dan radikal? Mereka menutupi wajah dengan selubung kain hanya demi menjaga kehormatan. Dengan sepotong kain itu, mereka mengaku lebih banyak mendapatkan hal positif, misalnya bisa lebih mengontrol perilaku agar lemah lembut, cara berbicara yang lebih lembut dan menghindari berteriak. Para mahasiswi bercadar tersebut justru mengaku risih sebab masih banyak yang mempermasalahkan pemakaian cadar. Sementara yang dipermasalahkan merasa nyaman-nyaman saja dan tidak menganggap ada masalah sama sekali.

Mereka juga tidak menganggap diri lebih baik dan benar dari teman-teman lain yang tidak mengenakan cadar. Para mahasiswi bercadar tetap memiliki teman dekat dengan kawan-kawan mereka yang tidak mengenakan cadar. Ketika ditanyakan apakah mereka tidak risih bergaul dengan kawan-kawan yang tidak mengenakan cadar, mereka menjawab sama sekali tidak keberatan. Mereka juga tidak masalah jika ada beberapa teman yang awalnya mengenakan cadar dan sekarang mencopot cadarnya dan lalu mengenakan jilbab biasa. Perkawanan tetap terjaga, tanpa perlu menggurui dan merasa digurui oleh masing-masing pihak. Mungkin kawan-kawan yang belum mengenakan cadar menurut mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah, tetapi bukan berarti menghalangi mereka untuk saling berteman baik. Suasana kelas juga berjalan dengan baik jika ada mahasiswi yang mencopot cadarnya di kelas. Sang mahasiswi akan disediakan kursi di depan dan teman-temannya yang laki-laki mundur ke belakang agar sang mahasiswi tersebut tidak harus risih karena wajahnya terlihat oleh teman-temannya yang laki-laki. Para mahasiswi yang mengenakan cadar juga mengaku bahwa mereka tidak mendapat penolakan dari orang tua ketika ia mengenakan cadar meskipun ibu atau saudara perempuannya tidak mengenakan cadar.

Model dan cara berpakaian adalah soal style dan soal kenyamanan. Ada orang yang merasa nyaman dan aman ketika menggunakan cadar (bukan sekedar jilbab panjang), tetapi ada pula yang tidak nyaman ketika menggunakan cadar. Bukankah ini pilihan cara berpakaian? Ketika orang terbiasa menggunakan cadar dan diminta untuk menanggalkan cadarnya demi alasan yang tidak berhubungan secara signifikan dengan konsekuensi akademiknya, maka sama saja dengan ketika perempuan menutup auratnya diminta untuk membuka auratnya. Aturan tentang penggunaan cadar atau tidak mestinya dapat dikaji secara akademik rasional agar tidak menabrak hak-hak individu. Sebuah aturan yang ditegakkan berhubungan dengan situasi akademik, maka untuk sebuah institusi pendidikan dapat saja dibenarkan. Akan tetapi jika aturan dan penghakiman ditinggalkan demi kontrol atas hak dan kenyamanan, lebih-lebih lagi adalah keyakinan agama, maka rasanya menjadi hal yang terlalu tergesa-gesa. Negara telah menjamin kebebasan berkeyakinan dengan syarat tidak mengganggu dan mengancam sistem negara itu sendiri. Sebuah kekeliruan jika para pemakai cadar menganggap apa yang mereka yakini adalah sebuah kebenaran satu-satunya. Salah pula jika para pemakai cadar menganggap bahwa sepotong kain yang

dikenakannya adalah tiket bagi surga yang serta merta dapat dimilikinya. Pada saat bersamaan juga menganggap bahwa perempuan yang tidak mengenakannya tidak berhak atas surga. Anggapan-anggapan demikian adalah klaim kebenaran (*truth claim*) yang sangat menyesatkan dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Akan tetapi, jika memakai cadar adalah sebuah keyakinan atas dasar menutup aurat (yang juga dibenarkan oleh agama) dan orang yang mengenakannya merasa lebih nyaman dan aman oleh sebab merasa kehormatan dirinya sebagai perempuan lebih terjaga, maka tidak ada seorang pun yang diberi hak untuk mengontrolnya. Yang bisa dilakukan adalah mencegah dan mengantisipasi situasi-situasi yang berpotensi dapat menimbulkan perpecahan dan konflik.

Keterkejutan kampus karena hadirnya mahasiswi bercadar disikapi pimpinan dengan memanggil para mahasiswi bercadar untuk dijelaskan kondisi kampus, diperjelas dasar keyakinan mereka menggunakan cadar, bahkan diberikan pertanyaan “bersediakah mereka melepas cadar jika aturan kampus menghendaki demikian?”. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang terlambat dilontarkan serta terlalu jauh mencampuri privatisasi seseorang. Pertanyaan tersebut juga terlalu sensitive, sebab menyoal keyakinan agama seseorang. Mengapa pertanyaan demikian baru dikemukakan sekarang. Kemana pertanyaan tersebut pada tahun 2014 atau ketika ada dosen dan mahasiswi yang mengenakan cadar hadir di kampus. Para mahasiswi bercadar bahkan kini ada yang sudah selesai ujian skripsi dan pada bulan November 2017 akan diwisuda. Dalam aktivitas akademik, para mahasiswi lama tersebut tetap menggunakan cadar tanpa gangguan atau mengatasnamakan aturan kampus. Pemanggilan mahasiswi bercadar, lontaran pertanyaan dan pemberitahuan tentang kondisi kampus adalah reaksi kepanikan yang emosional, ini adalah bentuk ketakutan sekaligus kontrol atas keyakinan dan kuasa tubuh perempuan sekaligus.

Para mahasiswi baru bercadar yang dipanggil menjawab bahwa mereka tidak berkeberatan jika memang harus melepas cadar. Tetapi benarkah mereka tidak keberatan secara psikologis dan secara keyakinan?. Saya kira tidak sesederhana demikian. Para mahasiswi yang mengenakan cadar menggunakannya karena dorongan keyakinan agama untuk menutup aurat mereka dan pilihan tersebut lebih dari sekedar style atau gaya berpakaian. Meminta mereka untuk melepas cadar bukankah sama saja dengan meminta perempuan yang memegang teguh keyakinannya untuk melepas sesuatu yang menutupi auratnya. Apakah ini tidak sama dengan meminta mereka untuk menelanjangi auratnya?. Perlakuan-perlakuan “khusus” terhadap mahasiswi bercadar di kampus IAIN Kendari sesungguhnya adalah bentuk kontrol dan politisasi kepatuhan atas tubuh perempuan sekaligus juga viktimisasi korban secara tergesa-gesa. Kampus membiarkan paham apa saja bertumbuh kembang di institusi pendidikan agama ini. Bersamaan dengan itu hadir pula para mahasiswi yang menduga bahwa kampus yang notabene adalah kampus Islam akan membiarkan mereka mengenakan cadar, sebagaimana misalnya membiarkan aliran paling radikal sekalipun tumbuh. Di sisi lain, kampus juga tidak memiliki banyak alternatif kegiatan keagamaan berupa organisasi kemahasiswaan atau kajian-kajian rutin keagamaan yang bercorak moderat. Ketika para pemakai cadar ini diminta untuk menanggalkan cadarnya, maka mereka merasa tidak siap. Dalam wacana ketidakadilan sosial, para perempuan bercadar adalah korban yang dihukum secara tergesa-gesa.

Menyoal tubuh dan aurat perempuan adalah hal yang sangat menarik dan sensitif. Sensitivitas yang dimilikinya bukan hanya berhubungan dengan tubuh perempuan yang dianggap seksi tetapi juga menyentuh sensitivitas agama yang cukup rentan dalam pemaknaannya. Saat perempuan hampir menelanjangi tubuhnya, ia dituding sebagai sang pendosa. Ketika perempuan memilih mengenakan sehelai kerudung untuk menutupi rambutnya, ia juga disalahkan bahkan dituding sebagai liberal. Kini, ketika perempuan menjatuhkan pilihan pada sepotong kain yang menyelubungi wajahnya demi alasan rasional dan substantif, yaitu kehormatan dan martabat diri, ia tetap diklaim penganut agama garis keras. Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan bercadar yang diidentikkan dengan radikalisme dan terorisme berangkat dari fenomena para perempuan kombatan atau istri-istri para pelaku teroris yang rata-rata menggunakan jilbab panjang atau bercadar. Hal ini tiak disalahkan, tetapi jika menganggap semua perempuan bercadar adalah calon “pengantin” terorisme adalah kesimpulan yang terlalu tergesa-gesa.

Atas nama aturan, atas nama stabilitas, atau atas nama pembenaran agama, perempuan bahkan tetap tidak memiliki kuasa atas tubuhnya sendiri. Tubuh perempuan nyatanya bukan milik dirinya sendiri, ia tetap milik sistem, baik itu sistem sosial atas nama reguasi dan stabilitas, bahkan sistem agama (atas nama pembenaran keyakinan). Ketika perempuan berpakaian minim, ia dituding sebagai penyebab dosa dan lokus pornografi (pornografi yang dibuat secara sengaja oleh para pemegang kuasa, entah itu kuasa pengetahuan dan teknologi). Bahkan ketika perempuan hendak menutup auratnya atas nama perlindungan terhadap kehormatan dirinya, tetap juga diklaim “salah” dalam memahami agamanya, “keliru” dalam melindungi aurat tubuhnya yang hendak dijunjung tinggi dan dilindungi.

Perempuan dan posisinya dalam level berpakaian apapun tetaplah salah dan tak punya kuasa atas tubuhnya sendiri sekalipun. Haknya atas diri sendiri tetaplah dikontrol oleh sistem, baik itu sistem sosial, sistem budaya, bahkan sistem agama. Kontrol sosial, budaya, dan agama atas pakaian perempuan atau apapun yang dikenakannya dengan mengatasmakan regulasi, stabilitas, keteraturan, bahkan demi pelurusan pemahaman agama dikhawatirkan justru akan melahirkan bentuk radikalisasi baru dengan pola dan karakteristik yang kurang lebih sama. Radikalisasi tersebut dapat berbentuk penghakiman yang memaksa atau menindas kenyamanan sang pemilik tubuh itu sendiri. Bentuk radikalisasi yang dilakukan oleh intitusi perguruan tinggi agama jika tidak disikapi secara lebih hati-hati, maka dikhawatirkan akan terjadi pembiaran paham-paham apapun masuk tanpa ada kontrol pada satu sisi yang menyebabkan perguruan tinggi tidak lagi punya kuasa dan imun atas filter keagamaan, tetapi pada sisi yang lain juga dikhawatirkan kampus akan lebih jauh melakukan retriksi atau pembatasan terhadap kebebasan akademik. Dilema demikian persis yang digambarkan Suhadi (2017) dalam temuannya tentang peran perguruan tinggi yang berada di antara ketidakpastian prosedur birokratis dalam kampus dan kegamangan kampus saat berhadapan dengan pihak-pihak luar.

E. Penutup

Fenomena mahasiswi bercadar di IAIN Kendari mulai marak sejak tahun 2014 dan semakin menguat pada tahun 2017. Terdapat 7 mahasiswi baru yang memakai cadar yang terdapat sebagai mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (4 orang) dan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (3 orang). Perlakuan yang berbeda dan khusus terhadap para mahasiswi bercadar di IAIN Kendari menunjukkan bentuk kepanikan akademik yang tergesa-gesa. Kondisi ini menimbulkan “kecurigaan” baik bagi mahasiswi bersangkutan maupun pihak kampus, sebuah dugaan yang keliru oleh karena sepotong kain yang menjadi selubung penutup wajah. Sang mahasiswi yang dengan tergesa menganggap nilai buruk yang diterimanya disebabkan oleh “sepotong kain”, sebaliknya “sepotong kain” bagi kampus (pimpinan) dianggap sebagai ancaman yang perlu dikontrol. Selubung wajah secara sosial-akademik dianggap menghalangi transparansi pemberian nilai dan dianggap pula sebagai penghalang komunikasi serta sampainya ilmu pengetahuan dengan lebih tepat. Pada pemahaman religius cadar adalah representasi dari fundamental atau bahkan radikal.

Memakai jilbab atau tidak, menggunakan jilbab panjang atau memakai cadar adalah soal keyakinan agama sebagai bagian dari kepatuhan kepada Tuhan. Ia bagian dari kepatuhan teologis. Agama adalah soal privat dan negara seharusnya tidak punya kuasa penuh untuk mengontrol keberagaman seseorang (selama ia tidak membahayakan ketertiban umum dan mengancam ideologi negara). Ketika kepatuhan teologis diperhadapkan bahkan mesti dikalahkan oleh kepatuhan sosial (intitusi, kebijakan dan regulasi kampus), maka rasanya-rasanya adalah kebijakan yang kurang arif dan tergesa-gesa. Jika kepatuhan teologis mesti dikalahkan demi kepatuhan sosial-akademis untuk alasan mencegah timbulnya paham dan gerakan radikalisme, maka sesungguhnya telah memupuk gerakan radikalisme baru yang dampaknya tidak kalah massif dengan radikalisme sebelumnya.

Tubuh perempuan bukanlah milik dirinya sendiri, baik ia tidak mengenakan pakaian, berpakaian minim atau menutupi auratnya sekalipun. Ketika perempuan berpakaian minim hanya menutupi sebagian kecil tubuhnya, maka ia disalahkan dan dituding sebagai awal dan penyebab timbulnya pornografi bahkan dianggap pematik hasrat seksual dari pemerkosa. Sementara hasrat si pemerkosa yang liar dan brutal seolah menjadi hal yang sewajarnya. Ketika perempuan ingin menghindari dituding sebagai penyumbang pornografi dan menutupi hampir keseluruhan tubuhnya atas dasar keyakinan sebagai aurat, lagi-lagi masyarakat menudingnya sebagai agen fundamentalis dan radikal, seolah dibalik jilbab yang menjuntai panjang atau dibalik cadar ada bom yang siap dimuntahkan. Apa yang salah dengan model rasionalitas cara berpikir demikian? Logika seperti apa yang dipakai? Fenomena ini menandakan bahwa perempuan, mulai berpakaian minim hingga menutup keseluruhan tubuhnya selalu menjadi korban sistem sosial yang diskriminatif, sekaligus juga upaya politisasi terhadap tubuh perempuan untuk membuat mereka patuh terhadap sistem sosial itu sendiri, sebuah sistem yang diskriminatif.

Sumber Bacaan;

Buku dan Jurnal;

Abdullah, Irwan. 2002. “Mitos Menstruasi; Konstruksi Budaya atas Realitas Gender”. Dalam Jurnal *Humaniora*, Vol. 14, No. 1 Februari, h. 34-41.

- Benedicta, Gabriela Devi. 2011. "Dinamika Otonomi Tubuh Perempuan: Antara Kuasa dan Negosiasi atas Tubuh". Dalam *Jurnal Sosiologi*, Vol. Vol. 16, No. 2, Juli, h. 141-156.
- Eriksen, TH. 1993. *Etnicity & Nationalism; Antropological Perspective*. Colorado: Pluto Press.
- Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Tenggara. 2015. *Peta Potensi Radikalisme dan Terorisme di Sulawesi Tenggara*. Laporan Penelitian.
- Hall, S. 1992. "The Question of Cultural Identity". dalam Hall, David, dan McGrew (Eds.). Dalam *Jurnal Modernity and Its Future*. Cambridge: Polity Press in Association with Open University.
- Ida, Rachmah. 2004. "Tubuh Perempuan dalam Goyang Dangdut". Dalam *Jurnal Perempuan* 41 Seksualitas. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Kahn, JS. 1995. *Culture, Multiculture, Postculture*. London, Thousand Oaks, and New Delhi: SAGE Publication.
- King, VT. 1982. "Etnicity in Borneo; An Antropological Problem". Dalam *South East Asian Journal of Social Science*. 10 (1): 23-43.
- Kipp, RS. 1993. *Dissociated Identity; Etnicity, Religion, and Class in an Indonesian Society*. USA: The University of Michigan Press.
- Marcoes-Natsir, Lies M& Lanny Octavia. 2014. *Kesaksian Para Pengabdian: Kajian tentang Perempuan dan Fundamentalisme di Indonesia*. Jakarta: Rumah Kitab-Norwegian Centre for Human Rights.
- Picard, M. 1997. *Tourism, Etnicity, and The State in Asian and Pacific Societies*. Honolulu: University of Hawai's Press.
- Rohmana, Jajang A&Ernawati. 2014. "Perempuan dan Kearifan Lokal; Performativitas Perempuan dalam Ritual Adat Sunda". Dalam *Jurnal Munawa*, Vol. 13, No. 2 Desember, h. 151-165.
- Setyabudi, Imam&Mukhlis Alkaf. 2011. "Antropologi Feminisme dan Polemik Seputar Tubuh Perempuan Penari Jaipong menurut Perspektif Foucault". Dalam *Jurnal Humaniora*, Vol. 23, No. 1.
- Suhadi. 2017. *Kebebasan Akademik dan Ancaman yang Meningkat*. Laporan Kehidupan Beragama. Edisi I, Juli. Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Universitas Gajah Mada.
- Surur, Miftahus dan Novi Anoe-grajekti. 2004. *Politik Tubuh: Seksualitas Perempuan Seni, dalam Srinthil Mengenai Politik Tubuh Perempuan*. Depok: Kajian Perempuan Desantara.
- Wood, RE. 1998. "Touristic Etnicity; A Brief Itinerary". Dalam *Etnic and racial Studies*. 21 (2): 218-241.
- Zainal, Asliah. 2017. "Perempuan dan Radikalisme". Paper dipresentasikan dalam kegiatan Perempuan Pelopor perdamaian FKPT di Hotel Same, Kendari, 27 April 2017.
- . 2016. *Oase Di Tengah padang Pasir; Islamic Center Mu'adz bin Jabal (ICM) dan Konstruksi Religius Masyarakat Kota Kendari*. Penelitian Kompetitif Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Kendari.
- . 2015. "Spot-Spot Radikalisme di Sulawesi Tenggara". Paper dipresentasikan dalam kegiatan "Penguatan Lembaga Keagamaan Desa" IAIN Kendari, 12-13 Mei 2015.

Website;

- Republika.co.id. 2017. "Larangan Cadar". http://www.republika.co.id/index/hot_topic/larangan_cadar. Diakses tanggal 10 Oktober 2017.
- Tempo.co. 2015. "Belanda larang cadar di Tempat Umum dan Sekolah". <https://dunia.tempo.co/read/669472/belanda-larang-cadar-di-tempat-umum-dan-sekolah>. Diakses tanggal 10 Oktober 2017.